

Analisis Dimensi Kinerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Oleh :

Yudha Adjie Brata, Nina Widowati, Ari Subowo

**Jurusan Administrasi Publik
Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The People Indonesia Demands against the good performance requires earnest effort to make it happen because the performance of the current government bureaucracy is still not the case shows high performance. This marked one of them is still of low quality of service given by bureaucracy to the people and this is also often accused as one of the factors the causes of fall of the country. As reported by the people's Minds that revenues and service area (DPPKD) the City of Cirebon to mess around because of his difficult regulate advertising is not permitted. The lack of coordination of organizational performance in taking care of the PAD and may lead to a slowdown in overall development.

This research uses qualitative, description to describe and analyze the performance of the department of revenue and financial management of the City of Cirebon area and description the dimensions that are available in the process of their performance. The collection of the data with the document, observation and interviews.

Based on the result of the deliberations of research department of revenue and the financial management of the City of Cirebon region who has been describe in the previous chapter, it can be concluded that the performance of the department of revenue and the financial management of the City of Cirebon Area is already good because it already runs the principles of public administrasion and run their performance with a good organization coordination. DPPKD City of Cirebon's performance in his job was always on the watch by community and other agencies so that the performance, the income and financial management of the City of Cirebon Area remains stable and able to maintain their performance.

Keywords: Performance; department; tax

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagi Bangsa Indonesia tuntutan terhadap kinerja yang baik memerlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya dikarenakan kinerja birokrasi pemerintah saat ini ditengarai masih belum menunjukkan kinerja yang tinggi. Hal ini ditandai salah satunya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada masyarakat dan ini pula yang sering dituding sebagai Kota Cirebon dipusingkan karena susahnyamenertibkan reklame tidak berijin. Kurangnya koordinasi kinerja organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Cirebon dalam mengurus PAD dan dapat mengakibatkan perlambatan pembangunan secara keseluruhan. salah satu faktor penyebab terpuruknya negara ini. Seperti yang dilansir Pikiran rakyat bahwa Dinas Pendapatan dan Daerah (DPPKD).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon bertugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. maka dalam mengukur kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon diperlukan untuk mengetahui target dan realisasi anggaran Kota Cirebon tersebut.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2007-2011

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2007	60.149.741.350	62.785.311.466
2	2008	66.221.947.984	67.692.575.085
3	2009	78.936.724.916	79.393.482.249
4	2010	99.730.336.762	137.485.005.026
5	2011	137.147.929.763	123.055.471.309

Sumber :Laporan bulanan realisasi pendapatan DPPKD Kota Cirebon 2007 - 2011

Jika dicermati data dari tabel di atas, maka realisasi terhadap target pendapatan asli daerah kota Cirebon memang dari tahun ke tahun meningkatkan akan tetapi pada tahun 2011 realisasi pendapatan asli daerah kota Cirebon tidak sampai pada target. Ini membutuhkan pada tahun 2011 kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon mengalami kemunduran meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) Kota Cirebon.

Dari hasil penelitian dan uraian di atas, permasalahan yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dapat dilihat dari :

- Masih adanya pegawai yang pada saat jam kerja malah bersantai-santai, tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga diasumsikan menunjukkan kurangnya agresifitas pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan

observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 13 Juni 2012 dimana ada pegawai yang duduk di bukan di tempet mengobrol masalah yang berbeda dan dilakukan pada saat jam kerja serta bukan untuk kepentingan pekerjaan.

- Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan penulis kepada salah satu pegawai pada Bagian Tata Usaha, menyatakan bahwa pemimpin cenderung kurang memberikan pengarahan kepada para pegawai di dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka dan kurang menanamkan komitmen untuk mencapai hasil yang maksimal dalam bekerja sehingga persepsi bawahan akan orientasi hasil kerja belum tercapai.
- Kurangnya pegawai dalam menganalisis masalah yang ada pada pekerjaan yang dibebankan sehingga menyebabkan banyak pekerjaan yang belum terselesaikan.
- Kurangnya pegawai yang mengerti prosedur dalam menengani para wajib pajak yang bermasalah.
- Berdasarkan hasil Tanya jawab terhadap masyarakat yang wajib pajak masing merasa bingung dalam pembayaran pajak dan proses pembayarannya masih lama.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Dan**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon“.

B. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil Tujuan dalam penelitian ini, adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
2. Mendeskripsikan dimensi-dimensi kinerja yang terdiri dari 4 dimensi, Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah konsep kinerja Menurut Chaizi Nuscha kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dari suatu organisasi setelah melakukan reformasi administrasi yang diukur berdasarkan dimensi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas¹. Menurut Agus Dwiyanto penilaian kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.²

Dalam konteks mengukur kinerja birokrasi di Indonesia, menurut Dwiyanto mengemukakan beberapa

¹ Chaizi Nasucha, Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktek), Gramedia, Jakarta, 2004 hal 37

² Agus Dwiyanto dkk.,2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik³, yaitu :

a. Produktivitas

Menurut Sondang. P. Siagian produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. Istilah *output* berkaitan dengan efektivitas dalam mencapai hasil atau prestasi, sedangkan input berkaitan dengan sumber-sumber yang dipergunakan berhubungan dengan efisiensi dalam mendapatkan hasil dengan penggunaan sumber daya manusia yang maksimal⁴.

b. Kualitas Layanan

Banyaknya pandangan negatif tentang organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan/aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Kinerja merupakan modal yang dapat menunjang terhadap kesuksesan yang akan dicapai organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Maka dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan kinerja yaitu suatu hasil atau proses yang dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan menurut kriteria tertentu dan dalam waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan organisasi.

D. METODE

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan tipe penelitian jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial, menggambarkan suatu gejala sosial

³ Agus Dwiyanto dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2002 hal. 47

⁴ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2002 hal 92

dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan. Sehingga dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti mencoba menjelaskan dan menganalisis Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

a. Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang beralamat di **Jl. Pengampon No. 04 Kota Cirebon**. Penelitian ini berfokus pada studi kasus tentang Analisis Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

b. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang akan menjadi nara sumber penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala DPPKD
2. Sekretaris DPPKD
3. Kepala Subbagian Umum

c. Jenis Data

Pada penelitian kualitatif ini menggunakan jenis data yang berupa :

1. Data angka
2. Data tertulis
3. Data gambar
4. Data table

d. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan Analisis Kinerja DPPKD Kota Cirebon, baik dari tinjauan pustaka maupun dokumen – dokumen.

e. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumen
4. Studi Kepustakaan

f. Analisis dan Intrepretasi Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif. Menurut Farid bahwa analisa kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam

menghubung-hubungkan fakta dan informasi, data dan informasi.⁵

g. Kualitas Data

Teknik untuk menguji kualitas data yang digunakan adalah, antara lain :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Produktivitas

Setelah melihat hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap informan, di temukan bahwa produktivitas yang terjadi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dalam meningkatkan penerimaan pajak dilakukan koordinasi antar bidang sebelum melakukan pekerjaannya dikarenakan kurangnya pegawai dan sudah kurang produktifnya para pegawai dilihat dari umur pegawainya. Untuk meningkatkan kinerja pegawai DPPKD Kota Cirebon memlakukan juga Dana Insetif untuk para pegawainya

dalam meningkatkan kinerja para pegawainya.

2. Responsivitas

Responsivitas yang terjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, dalam melakukan kinerjanya mengikuti Visi dan Misi mereka dalam setiap pekerjaannya dalam memungut pajak daerah. dalam menampung aspirasi masyarakat masih mengalami beberapa kendala dalam meningkatkan kinerja mereka dalam memberi dan menerima informasi dari masyarakat umum khususnya.

3. Responsibilitas

Dilihat dari hasil wawancara mengenai dimensi responsiilitas yang telah dilakukan ditemukan bahwa DPPKD Kota Cirebon dalam bekerja menjunjung komitmen mereka dalam meningkatkan kinerja mereka. Dari hasil penerimaan pajak pun selalu di adakan pengecekan yang dilakukan dari badan lain untuk mengetahui kinerja DPPKD Kota Cirebon.

4. Akuntabilitas

Berdasarkan pernyataan tersebut maka permasalahan yang dihadapi dalam akuntabilitas DPPKD Kota Cirebon, masih kurangnya pertanggungjawaban terhadap masyarakat dalam memberikan informasi yang mudah untuk di akses oleh masyarakat yang ingin lebih tahu mengenai persoalan pajak daerah.

⁵ Bahtiar, Nu'man. 2008. *Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Fungsional Toc (Training Officer Course) Pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah*. Semarang ;Undip

B. ANALISIS

1. Produktivitas

Produktivitas dalam proses penyelenggaraan realisasi penerimaan pajak daerah oleh DPPKD Kota Cirebon sudah bisa terlihat dengan pencapaian mereka 3 tahun yang lalu menurut laporan realisasi penerimaan pajak daerah. walaupun dalam proses produktivitasnya masih menemukan kendala-kendala dalam meningkatkan target-target mereka. Kurangnya pegawai, usia pegawai yang kurang produktif dalam bekerja dan juga wawasan pegawai dalam menjalankan mekanisme pajak.

2. Responsivitas

Responsivitas yang terjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, dalam melakukan kinerjanya mengikuti Visi dan Misi mereka dalam setiap pekerjaannya dalam memungut pajak daerah.

Responsivitas yang dilakukan guna proses meningkatkan pelayanan terhadap Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon belum memiliki blog/Web dalam menampung aspirasi masyarakat untuk memberi informasi penuh mengenai pajak terhadap masyarakat tetapi dengan sikap transparansi yang dilakukan oleh DPPKD Kota Cirebon terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan

keterbukaan kritik dari masyarakat maupun lembaga – lembaga.

3. Responsibilitas

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam proses meningkatkan kinerja sudah bisa mengikuti prinsip-prinsip administrasi dalam pekerjaan mereka walaupun sering kali menemukan kendala-kendala. Kurangnya pegawai mengerti akan mekanisme memasukan beberapa data-data, tidak semua pegawai melakukan pekerjaan mereka sesuai jurusan mereka atau kemampuan dasar mereka dalam memecahkan masalah yang mereka temui. Dan banyaknya usia yang sudah kurang produktif dalam bekerja karena perkembangan administrasi yang kian berganti-ganti tiap tahunnya. Yang membuat semakin memperlambat jalannya kinerja yaitu kantor DPPKD Kota Cirebon dipisah menjadi 2 salah satunya bidang penganggaran dan bidang akuntansi ada di kantor Walikota.

Untuk prosedur kerja DPPKD Kota Cirebon selalu menerapkan transparansi dan pengawasan audit dari BPK dan audit INSPEKTORAT.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang ada didalam DPPKD Kota Cirebon dapat dilihat dari beberapa hal :

Tanggung jawab Dinas dalam mencapai target yang telah ditentukan diawasi langsung oleh

Walikota Cirebon Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap kinerja petugas dengan melalui laporan kegiatan baik dalam bentuk teks dokumen maupun data-data yang diperoleh dilapangan.

Upaya untuk mencapai target DPPKD Kota Cirebon melakukan pekerjaan yang maksimal dalam mengumpulkan pajak daerah dan juga memberi pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang kesulitan.

Kinerja DPPKD Kota Cirebon memperlihatkan kemajuan dengan mencapai target dari tahun ke tahun. Walaupun dengan masih ada beberapa hambatan dalam mencapai target yang ingin di realisasikan demi kemajuan pembangunan. Dalam proses mencapai target yang telah ditentukan DPPKD Kota Cirebon mengalami beberapa kesulitan untuk mencapai target tersebut. Apalagi di awal tahun sempat mengalami beberapa kesulitan mengumpulkan pajak karena banyaknya pajak yang hilang dari pengamatan petugas pajak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon sudah baik karena sudah menjalankan prinsip-prinsip

administrasi publik dan menjalankan kinerja mereka dengan koordinasi organisasi yang baik. Kinerja DPPKD Kota Cirebon. Target yang ditetapkan selalu sampai pada realisasi target pajak. kinerjanya pun selalu di awasi oleh masyarakat melalui media massa dan institusi agar kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon tetap stabil dan mampu mempertahankan kinerja mereka.

B. REKOMENDASI

Melihat dari kekurangan kinerja DPPKD Kota Cirebon Maka rekomendasi yang diajukan :

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Cirebon dapat melakukan Penambahan tenaga/personil dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak daerah.
2. Membuat tempat penampung aspirasi dan informasi mengenai pentingnya pajak untuk masyarakat seperti membuat blog/web untuk meningkatkan responsivitas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya membayar pajak agar membantu pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Agus Dwiyanto dkk.,2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Yogyakarta.
- Bernadin, H John and Joyce EA Russel, 1999, *Human Recources Management*, International Edition,Singapore, Mc Grawhill Inc
- Chaizi Nasucha.2004. *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Pratek)*, Gramedia, Jakarta.
- Christia Natali, Dessy. 2006. *Analisis Kinerja Pegawai Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Pemerintahan Kota Semarang*. Semarang ;Undip
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta;
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Akademi Manajemen Perusahaan. YPKN. Yoyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Michael Armstrong, 2004. *Performance Management*, Kogan Page LTD, London.
- Ruky, Achmad S, 2008. *Sistem Manajemen Kinerja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Steers, Richard M, terjemahan Yamin, Magdalena, Pent. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Soeprihanto, John. 2009. *Penilaian kinerja dan pengembangan karyawan*.Yogyakarta : BPF
- Siagian, Sondang P. 1996. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta :Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung :Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2004: *Pengaruh Antara Kemampuan dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai BPN Kota Semarang* (Skripsi dari Ario Dewanto D2A307005). Semarang : Undip.
- Wahjosumidjo, (1985) : *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Pers
- Keputusan kepala LAN RI no. 239 tahun 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah kota Cirebon Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

